

DINAMIKA KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KESEPAKATAN ASEAN-*EUROPEAN FREE TRADE* *ASSOCIATION*(EFTA) : STUDI KASUS INDONESIA-SWISS

Bryan Al Farizi¹ & Fitrisia Munir²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: bryanalfarezi71@gmail.com

Abstract

The Dynamics of Indonesia's Economic Interests in the Implementation of the ASEAN-European Free Trade Association (ASEAN-EFTA) Free Trade Agreement, with a Special Focus on the Bilateral Relationship Between Indonesia and Switzerland Under the Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). This agreement presents strategic opportunities for Indonesia to expand export market access, enhance the competitiveness of domestic products, and attract foreign direct investment from the EFTA region. Research findings indicate that the implementation of IE-CEPA has positively impacted Indonesia's exports to Switzerland and other EFTA countries, particularly in rubber, coffee, spices, and furniture products. However, Indonesia also faces structural challenges, including limitations in logistics infrastructure, the readiness of businesses to meet international standards, and suboptimal inter-institutional policy coordination. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through literature reviews, official documents, and academic journal publications. The findings affirm that optimizing the benefits of free trade agreements requires national policy synergy, strengthening domestic industries, and technical support for businesses to compete in an increasingly competitive global market.

Keywords: ASEAN-EFTA, IE-CEPA, Indonesian economy, Indonesia-Switzerland relations, exports, competitiveness.

PENDAHULUAN

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 1967, oleh lima negara anggota: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Beberapa faktor utama menentukan pembentukan ASEAN, termasuk kesamaan geografis, budaya, kepentingan, dan nasib. Dibentuk di Bangkok, Thailand, pada 5-8 Agustus 1967, lima menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara menandatangani Deklarasi ASEAN, yang juga dikenal sebagai Deklarasi Bangkok (Mutiarasari, 2023). Deklarasi tersebut ditandatangani oleh lima menteri luar negeri: Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand (CNN Indonesia, 2023).

Negara-negara ASEAN terletak di Asia Tenggara. Terletak di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik, dan di antara benua Australia dan daratan benua Asia. Sebagai keturunan dari ras malayan mongoloid yang menerima pengaruh budaya dari India, Arab, dan China, penduduk Asia Tenggara memiliki kesamaan budaya. Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara bersatu untuk mencapai kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban di tingkat nasional dan regional. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara juga memiliki persamaan nasib, karena pernah dijajah oleh negara lain. Seiring berjalannya waktu, anggota ASEAN menjadi 11 negara yaitu, Indonesia, Malaysia,

Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, dan Timor Leste (Mutiarasari, 2023).

Tujuan penting lainnya, memposisikan sebagai bagian penting dalam lanskap ekonomi global. Hal ini memungkinkan negara-negara ASEAN untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di luar kawasan dan berkontribusi terhadap produksi ekonomi global. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan, mengatasi masalah komoditas internasional, meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi, dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya (Pamungkas, 2022).

ASEAN juga memainkan peran penting dalam memajukan perdagangan bebas dan kolaborasi ekonomi dengan berbagai mitra melalui inisiatif strategis dan perjanjian, dimulai dengan pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional dengan menciptakan situasi perdagangan yang seimbang melalui penurunan tarif dan non-tarif bagi anggota ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif, menarik investasi asing langsung (FDI), dan meningkatkan perdagangan ASEAN. Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi utama di ASEAN, berkontribusi aktif dalam mewujudkan pasar tunggal di Asia Tenggara sejak berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Jepri, 2015).

Kerjasama antara ASEAN dan EFTA (European Free Trade Association) berawal dari kebutuhan kedua kawasan untuk memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan lintas kawasan. EFTA sendiri didirikan pada tahun 1960 sebagai blok dagang alternatif bagi negara-negara Eropa yang tidak bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa, dan kini beranggotakan Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Sementara itu, ASEAN telah lama dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan komitmen kuat terhadap integrasi ekonomi regional (Ardi & Sebayang, 2022).

Penurunan tarif mendorong peningkatan impor dari negara-negara EFTA ke Indonesia, terutama pada sektor-sektor seperti mesin, kimia, alat transportasi, dan produk makanan. Hal ini dapat menyebabkan persaingan yang lebih ketat bagi produk domestik Indonesia, namun juga memberikan konsumen Indonesia akses ke produk dengan harga lebih murah dan pilihan yang lebih beragam. Dampak makro ekonominya terlihat dari simulasi yang menunjukkan bahwa penghapusan tarif sampai 100% dapat meningkatkan output sektor-sektor tertentu di Indonesia dan mendorong pertumbuhan GDP sebesar 1,81%. Kesepakatan IE-CEPA ini secara keseluruhan diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi bilateral, meningkatkan investasi, dan mendorong modernisasi ekonomi Indonesia melalui alih teknologi dan peningkatan kapasitas (Paryadi, 2020).

Sektor-sektor yang terdampak oleh penurunan tarif dalam kerjasama antara Indonesia dan EFTA terutama meliputi berbagai sektor perdagangan barang dan jasa. Dalam perdagangan barang, sektor yang mendapat manfaat signifikan adalah produk perikanan, industri seperti tekstil, furnitur, sepeda, elektronik, dan ban mobil, serta sektor pertanian yang mencakup komoditas kopi dan kelapa sawit. Sektor jasa juga terdampak meliputi jasa profesi, telekomunikasi, keuangan, transportasi, dan pendidikan, yang mendapatkan akses pasar yang lebih terbuka ke negara-negara anggota EFTA (Antara, 2018).

Penghapusan atau penurunan tarif bea masuk ini juga berdampak pada sektor energi dan pertambangan, permesinan, infrastruktur sektor perikanan, kehutanan, serta industri kimia. Penurunan tarif ini tidak hanya mempermudah ekspor produk unggulan Indonesia ke pasar EFTA, tetapi juga menurunkan biaya impor bahan baku, barang modal, dan penolong yang dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri (Center, 2018).

Dalam penelitian yang dibuat oleh Inas Maisan yang berjudul “Kepentingan Dalam kerjasama ekonomi inter-regional: studi kasus *European Free Trade Association* (EFTA) dalam Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership*”, penelitian ini memiliki topik yang sama dan berkaitan dengan kerjasama antara Indonesia dan EFTA, tetapi dengan fokus yang berbeda. Perbedaan dari penelitian ini adalah dengan lebih spesifiknya tentang kerjasama ekonomi inter-regional dan juga meneliti dinamika bilateral yang terjadi antara Indonesia dan EFTA.

Dalam penelitian yang dibuat oleh Bahjatul Murtasidin yang berjudul “Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dalam Kerjasama *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dengan Australia”, topik pada penelitian ini membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), menekankan pada kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerjasama antar kedua negara.

Rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana Dinamika Kepentingan Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi ASEAN-European Free Trade Association (EFTA) lebih dalam terkait Studi Kasus Indonesia-Swiss?” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana Dinamika Kepentingan Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi ASEAN-European Free Trade Association (EFTA) : Studi Kasus Indonesia-Swiss.

Teori liberalisme menekankan perdamaian melalui banyak cara seperti diplomasi antar negara, demokrasi, kerjasama, dan organisasi internasional sebagai wadah untuk membangun kerjasama. Menurut perspektif liberalisme, kerjasama internasional dapat terjadi apabila semua pihak mematuhi peraturan global. Teori ini mempunyai tiga prinsip yaitu, percaya pada kekuatan akal, lebih mengedepankan kerjasama daripada konflik, dan menekankan kebebasan individu (Burchill et al., 2005).

Regionalisme dalam hubungan internasional merujuk pada konsep kerjasama antar negara yang terletak pada suatu wilayah geografis tertentu dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Konsep ini melibatkan pembentukan dan penerapan lembaga atau mekanisme yang mendukung tindakan kolektif di kawasan. Regionalisme tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga dimensi politik, sosial, dan budaya, yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan stabilitas antar negara-negara anggota. Regionalisme muncul karena ketidakmampuan pendekatan global dalam menyelesaikan berbagai persoalan dunia, awal regionalisme dikenal sebagai "regionalisme lama," yang berfokus pada integrasi formal melalui institusi-institusi negara, seperti pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa (KEE) yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa. Pada akhir 1980-an, muncul "regionalisme baru," yang lebih multidimensi dan melibatkan aktor-aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta.

Kepentingan nasional merupakan teori yang membahas hubungan luar negeri antar negara-negara yang ada didunia. Teori ini juga merupakan alat untuk menjelaskan perilaku sebuah negara dalam interaksinya di dunia internasional. Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional adalah motivasi suatu negara dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya. menurut Charles Bread, kepentingan nasional adalah alasan negara dengan tujuan-tujuan dan ambisinya dalam menjalankan hubungan internasional (Bakry, 2017).

Donald E. Nuechterlein, mengatakan bahwa kepentingan nasional terbagi ke dalam empat kepentingan dasar negara yang memotivasi suatu negara untuk menjalankan hubungan luar negerinya. Pertama adalah kepentingan pertahanan dan keamanan. Kepentingan ini menyangkut perlindungan terhadap wilayah dan warga suatu negara bangsa dari ancaman oleh negara lain. Kedua yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan ini untuk meningkatkan ekonomi negara dengan cara

menumbuhkan relasi atau kerjasama dengan negara lain. Ketiga adalah kepentingan tatanan internasional. Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman dan yang keempat adalah kepentingan ideologi. Kepentingan ini merupakan kepentingan negara untuk melindungi dan mempertahankan nilai-nilai ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain (Pammasena, 2020).

METODE

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan penelitian di lingkungan objek alami dengan subjek utama. Penelitian kualitatif, menurut Robert Bogdan dan Sari Biklen upaya untuk memahami dan menjelaskan apa yang diungkapkan oleh individu atau kelompok melalui interaksi dan tindakan mereka. Selain mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif dan pengalaman penelitian yang berbeda, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana peristiwa tersebut terjadi. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan juga sebagai cara melakukan penelitian yang berbentuk data data dan gambar gambar, sehingga hasil penelitian berupa sebuah kalimat ataupun lisan yang juga bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi, baik itu fenomena dalam dunia nyata, ataupun fenomena alam (Bogdan & Biklen, 1997).

PEMBAHASAN

Dinamika Kepentingan Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kesepakatan ASEAN-EFTA

Indonesia dalam dekade terakhir terus memperluas kerja sama ekonomi internasional melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas. Salah satu kerja sama strategis adalah penandatanganan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dengan negara-negara anggota EFTA: Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Perjanjian ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperluas jaringan mitra dagang non-tradisional serta mendiversifikasi tujuan ekspor ke negara maju di luar Uni Eropa. IE-CEPA mencerminkan upaya Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan negara-negara besar, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi dari negara kecil yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, sistem keuangan stabil, serta kapasitas investasi besar. Dalam hal ini, Swiss menjadi mitra paling dominan di antara negara-negara EFTA, baik dari sisi nilai perdagangan maupun investasi langsung ke Indonesia (ANTARA, 2025).

Salah satu dinamika utama dalam implementasi IE-CEPA adalah peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan Swiss. Statistik menunjukkan bahwa sejak perjanjian mulai berlaku pada November 2021, nilai perdagangan bilateral meningkat signifikan. Pada tahun 2023, total nilai perdagangan Indonesia-Swiss mencapai US\$3,11 miliar, melonjak dari sekitar US\$1,3 miliar pada tahun sebelumnya. Produk unggulan ekspor Indonesia yang mengalami peningkatan adalah logam mulia, perhiasan, kopi, minyak atsiri, serta alas kaki. Peningkatan ekspor ini sangat dipengaruhi oleh penghapusan tarif untuk sekitar 98% pos tarif dari Indonesia ke negara-negara EFTA. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas secara efektif, khususnya di sektor industri dan komoditas bernilai tambah (Pratiwi, 2024).

Kepentingan Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN-EFTA

Indonesia memiliki kepentingan ekonomi strategis yang kuat dalam kerja sama antara ASEAN dan EFTA, terutama dalam memperluas pasar, meningkatkan kualitas investasi asing, dan mendorong reformasi ekonomi domestik. Di tengah ketatnya kompetisi global dan tren proteksionisme yang meningkat, akses terhadap pasar negara-negara maju menjadi sangat penting. EFTA yang beranggotakan Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein merupakan kawasan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang sangat tinggi, teknologi industri maju, serta keterbukaan ekonomi. Dengan menjalin kerja sama perdagangan dan investasi melalui kerangka ASEAN-EFTA, Indonesia bisa meningkatkan volume ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional, karena tarif ekspor-impor banyak yang dihapuskan, hambatan non-tarif disederhanakan, serta peluang kerja sama teknis dan teknologi terbuka luas. Hal ini menjadi landasan utama bagi Indonesia untuk mengamankan akses pasar jangka panjang, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan energi terbarukan (Tololiu, 2022).

Selain aspek tarif, kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerja sama ini juga terletak pada peningkatan kualitas dan diversifikasi ekspor. EFTA dikenal sebagai kawasan dengan standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi lingkungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk dapat mengakses pasar EFTA, Indonesia terdorong untuk memperbaiki kualitas produknya terutama dalam sektor agroindustri seperti kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan perikanan. Hal ini memaksa industri di dalam negeri untuk menaikkan standar produksi dan menerapkan praktik berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap kualitas dan keberlanjutan, produk Indonesia akan memiliki nilai tambah lebih tinggi, baik di pasar EFTA maupun global. Di sisi lain, kerja sama teknis dengan negara-negara EFTA, terutama Swiss dan Norwegia, memberi peluang bagi Indonesia untuk memperoleh pelatihan, akses teknologi proses, dan program peningkatan kapasitas industri kecil-menengah. Maka, hubungan ini bersifat transformatif, bukan hanya transaksional (Larasati, 2021).

Kepentingan penting lainnya dari Indonesia adalah peningkatan arus investasi langsung asing (FDI). Negara-negara EFTA dikenal sebagai investor stabil dan jangka panjang yang lebih banyak menanamkan modal pada sektor-sektor strategis, seperti farmasi, pendidikan, energi bersih, teknologi informasi, dan keuangan digital. Swiss, sebagai pusat keuangan dan perusahaan multinasional global seperti Nestle, Novartis, dan ABB, telah memperlihatkan minat besar terhadap pasar Indonesia. Melalui skema perdagangan bebas ASEAN-EFTA, Indonesia menawarkan insentif yang lebih kompetitif dan kepastian hukum yang lebih tinggi. Perjanjian ini juga menyertakan ketentuan tentang perlindungan investasi, penyelesaian sengketa investor-negara, dan hak kekayaan intelektual. Indonesia berkepentingan memperkuat iklim investasi domestik agar selaras dengan standar EFTA, sehingga tidak hanya mendatangkan lebih banyak investor, tetapi juga mendorong reformasi kelembagaan dan perbaikan regulasi di tingkat nasional (BPDP, 2018).

Implementasi Perjanjian Indonesia EFTA CEPA

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA (IE-CEPA) yang mulai berlaku pada 1 November 2021 menandai babak baru dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Eropa non-Uni Eropa, khususnya Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Perjanjian ini mencakup bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasinya, IE-CEPA membawa dampak signifikan bagi peningkatan akses pasar Indonesia ke kawasan EFTA, terutama Swiss, yang merupakan mitra ekonomi utama dalam kelompok ini. Indonesia mendapatkan liberalisasi tarif untuk lebih dari 98% pos tarif

ekspornya ke EFTA, mencakup produk unggulan seperti perhiasan emas, kopi, minyak atsiri, dan komponen elektronik. Di sisi lain, Indonesia juga membuka akses bagi produk EFTA dengan pengaturan khusus agar tidak mengganggu industri domestik. Implementasi ini menjadi momentum penting dalam mendorong diversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia yang ditujukan ke pasar global berstandar tinggi (Ditjen PPI, 2021).

Selain dalam sektor perdagangan barang, implementasi IE-CEPA juga menunjukkan progres di sektor investasi. Melalui ketentuan dalam bab perlindungan investasi, investor dari EFTA memperoleh jaminan hukum dan perlakuan non-diskriminatif di Indonesia, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor Swiss dan Norwegia dalam menanamkan modal di sektor manufaktur, energi bersih, farmasi, serta sektor jasa seperti logistik dan pendidikan. Pada tahun 2023, Swiss menjadi negara Eropa terbesar kelima yang berinvestasi di Indonesia, dengan nilai realisasi 150,065 juta dolar AS. Implementasi IE-CEPA memungkinkan berbagai perusahaan EFTA, seperti Nestle, ABB, dan Holcim, memperluas operasi mereka melalui skema kemitraan dengan pelaku industri lokal di kawasan industri prioritas Indonesia. Ini membuktikan bahwa perjanjian tidak hanya membuka perdagangan, tetapi juga menjadi jembatan strategis bagi pertumbuhan investasi langsung yang berkelanjutan dan produktif (Pratiwi, 2024).

Namun, implementasi IE-CEPA tidak bebas dari tantangan, terutama dalam memenuhi standar keberlanjutan dan regulasi lingkungan yang ketat dari negara-negara EFTA. Isu utama yang dihadapi Indonesia adalah keberlanjutan produk kelapa sawit, yang menjadi sorotan di Swiss dan Norwegia karena dianggap berdampak pada deforestasi. Dalam IE-CEPA, kedua pihak sepakat untuk membentuk forum kerja sama teknis guna mendukung keberlanjutan dan ketertelusuran produk, termasuk pengakuan terhadap sertifikasi lingkungan seperti ISPO dan RSPO. Meski IE-CEPA tidak melarang ekspor sawit secara langsung, tekanan pasar dan opini publik Eropa memaksa Indonesia untuk memperkuat sistem sertifikasi dan mekanisme pelaporan lingkungan yang transparan. Di sisi lain, Indonesia juga menggunakan forum bilateral seperti Joint Committee dan Working Groups untuk mengadvokasi posisi nasional dan memperkuat narasi pembangunan berkelanjutan berbasis inklusi sosial. Dalam hal ini, IE-CEPA juga menjadi alat negosiasi politik ekonomi untuk melindungi komoditas strategis Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif (Hani & Purwoto, 2025).

Salah satu elemen kunci dalam implementasi IE-CEPA adalah penguatan kapasitas pelaku usaha domestik, khususnya UMKM, untuk dapat mengakses pasar EFTA secara maksimal. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan kerja sama dengan KADIN serta Swisscontact (organisasi pembangunan asal Swiss) telah menyusun berbagai pelatihan ekspor, peningkatan mutu produk, pelabelan, dan logistik. Fokus implementasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap standar teknis, sanitasi dan fitosanitasi (SPS), serta prosedur bea cukai lintas negara. Implementasi IE-CEPA juga mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan vokasi di Indonesia dan Swiss dalam rangka penyesuaian keterampilan tenaga kerja, terutama di sektor teknologi dan jasa kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa IE-CEPA tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga instrumen pembangunan kapasitas jangka panjang yang memperkuat fondasi daya saing nasional (Tempo, 2021).

Tantangan Implementasi di Tingkat Nasional

Implementasi Perjanjian IE-CEPA (Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement) di tingkat nasional menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Meskipun perjanjian ini membuka akses pasar dan investasi ke negara-negara EFTA yang mencakup

Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Indonesia harus mengupayakan penyesuaian kebijakan dalam negeri yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksiapan sektor usaha domestik, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam memenuhi standar teknis dan regulasi ketat dari negara-negara EFTA. Produk-produk Indonesia, terutama hasil pertanian, perikanan, dan industri makanan, kerap kali menghadapi hambatan non-tarif seperti regulasi keamanan pangan, pelabelan yang sangat detail, serta persyaratan lingkungan yang tinggi. Pelaku usaha dalam negeri banyak yang belum familiar dengan standar seperti HACCP, ISO, dan sertifikasi organik yang diwajibkan oleh pasar EFTA, sehingga peluang yang tersedia dalam IE-CEPA tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Dharmawan, 2021).

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan institusi pemerintah dan sistem birokrasi nasional. Meskipun IE-CEPA telah diratifikasi dan berlaku, sinkronisasi antar lembaga, baik pusat maupun daerah, dalam mendukung implementasi masih menjadi hambatan serius. Misalnya, belum semua pelabuhan ekspor dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kualitas dan sertifikasi sesuai standar internasional. Koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan lembaga teknis seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta BPOM masih sering tumpang tindih, menyebabkan proses ekspor menjadi lambat dan tidak efisien. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya sistem digitalisasi layanan ekspor dan ketidakterpaduan data lintas kementerian. Akibatnya, banyak eksportir pemula yang kesulitan memanfaatkan fasilitas perdagangan yang ditawarkan IE-CEPA. Dalam konteks ini, implementasi perjanjian perdagangan bebas membutuhkan reformasi tata kelola ekspor nasional yang lebih terintegrasi dan responsif (Lubis & Kartikasari, 2022).

Peningkatan Perdagangan Bilateral

Kesepakatan ASEAN-EFTA, khususnya melalui Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), telah memainkan peran strategis dalam mendorong peningkatan perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara-negara anggota EFTA, terutama Swiss. Perjanjian ini menciptakan kerangka kerja yang lebih liberal, adil, dan saling menguntungkan melalui penghapusan tarif bea masuk terhadap berbagai komoditas unggulan Indonesia, seperti produk kelapa sawit olahan, karet, kakao, tekstil, alas kaki, serta perhiasan. Sebaliknya, Indonesia juga membuka pasar domestik bagi produk-produk berkualitas tinggi dari negara-negara EFTA, termasuk alat kesehatan, produk farmasi, dan mesin industri. Struktur perjanjian ini memungkinkan peningkatan efisiensi perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan nontarif, menyederhanakan prosedur bea cukai, serta memperkuat kepastian hukum bagi eksportir dan importir dari kedua belah pihak. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pasca-implementasi IE-CEPA sejak 2021, terjadi tren peningkatan signifikan dalam nilai perdagangan bilateral Indonesia-Swiss, di mana ekspor Indonesia tumbuh lebih dari 10% per tahun secara rata-rata, dengan kontribusi dominan dari sektor manufaktur dan pertanian olahan (Kementerian Perdagangan RI, 2023).

Peningkatan perdagangan bilateral juga tampak dalam perubahan struktur ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA. Jika sebelumnya ekspor didominasi oleh produk primer seperti bahan mentah dan komoditas agrikultur, maka setelah implementasi perjanjian, terdapat pergeseran menuju produk bernilai tambah tinggi seperti elektronik konsumen, produk makanan dan minuman olahan, serta kosmetik halal. Negara-negara EFTA, terutama Swiss, menerapkan standar mutu dan keberlanjutan yang tinggi, yang mendorong eksportir Indonesia untuk melakukan transformasi produksi, memperoleh sertifikasi internasional, dan memperkuat manajemen mutu. Secara tidak langsung, hal ini

meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global secara keseluruhan. Lebih lanjut, IE-CEPA juga mencakup klausul fasilitasi perdagangan dan kerja sama teknis, yang memungkinkan Indonesia menerima bantuan teknis dalam bentuk pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan harmonisasi standar. Kolaborasi ini memperkuat kesiapan pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM ekspor, dalam menembus pasar negara maju dengan karakteristik konsumen yang kompleks dan menuntut (Susanti & Widodo, 2023).

Ekspor Indonesia ke Swiss dan Negara EFTA lainnya menunjukkan peningkatan dalam sektor produk karet, kopi rempah, rempah dan furnitur

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan negara-negara anggota European Free Trade Association (IE-CEPA) telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di kawasan EFTA. Dengan penghapusan dan penurunan tarif bea masuk terhadap berbagai produk unggulan Indonesia termasuk produk karet, kopi, rempah-rempah, dan furniture pasar EFTA kini menjadi lebih terbuka dan kompetitif bagi produk-produk domestik. Penyesuaian tarif ini memberikan keunggulan harga yang kompetitif, memungkinkan pelaku usaha Indonesia bersaing secara lebih efektif dengan produk dari negara lain di pasar Eropa. Dalam hal ini, Swiss berperan sebagai mitra dagang utama, sekaligus pintu masuk strategis ke pasar Eropa non-Uni Eropa yang menuntut standar tinggi terhadap mutu dan keberlanjutan produk (Nugroho & Safitri, 2023).

Daya saing produk Indonesia juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas produksi dan pemenuhan standar teknis yang ditetapkan oleh negara-negara EFTA. Negara-negara ini dikenal memiliki ketentuan ketat terkait keamanan produk, sertifikasi lingkungan, keberlanjutan, dan etika perdagangan. Oleh karena itu, IE-CEPA menjadi sarana penting dalam mendorong transformasi industri nasional untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut. Pelaku industri kopi, misalnya, mulai menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi seperti *organic* dan *fair trade* untuk memenuhi preferensi pasar Swiss. Demikian pula dalam sektor furnitur dan kerajinan, penggunaan bahan bersertifikasi legal dan penerapan desain ramah lingkungan semakin diperluas sebagai bagian dari adaptasi terhadap pasar EFTA yang sadar akan isu sosial dan lingkungan (Wahyuni & Sari, 2022).

KESIMPULAN

Implementasi kerja sama ekonomi melalui perjanjian ASEAN-EFTA, khususnya dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss, memberikan peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perjanjian IE-CEPA yang menjadi dasar kerja sama tersebut terbukti memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA, meningkatkan daya saing produk nasional melalui penurunan tarif, serta membuka peluang investasi asing di sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Keuntungan ini sangat dirasakan dalam peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti produk karet, kopi, rempah-rempah, dan furnitur, yang secara signifikan memperoleh posisi lebih kompetitif di pasar Swiss dan negara EFTA lainnya.

Namun demikian, dinamika implementasi IE-CEPA di tingkat nasional mengindikasikan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, baik dari sisi kesiapan industri domestik maupun koordinasi kebijakan lintas sektor. Pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih terkendala dalam hal pemenuhan standar mutu internasional, sertifikasi, akses pembiayaan, dan efisiensi logistik. Di sisi lain, belum optimalnya sinergi antara lembaga pemerintah

pusat dan daerah serta keterbatasan data ekspor dan sistem evaluasi kebijakan turut menghambat pemanfaatan maksimal dari perjanjian perdagangan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian ASEAN-EFTA, meskipun menjanjikan potensi ekonomi yang besar, tetap membutuhkan pendekatan strategis dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2018). *Perundingan Indonesia-EFTA CEPA selesai*. Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaraneews.com/berita/771428/perundingan-indonesia-efta-cepa-selesai>
- ANTARA. (2025). *RI-Swiss sepakat optimalkan CEPA demi dorong investasi-perdagangan*. KANTOR BERITA INDONESIA. <https://www.antaraneews.com/berita/4847053/ri-swiss-sepakat-optimalkan-cepa-demi-dorong-investasi-perdagangan>
- Ardi, A., & Sebayang, S. L. (2022). Kepentingan Dalam Kerja Sama Ekonomi Inter-Regional: Studi Kasus European Free Trade Association (Efta) Dalam Indonesia-Efta Comprehensive Economic Partnership. *Mjir) Moestopo Journal International Relations*, 2(2), 133–149.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative Research for Education*.
- BPDP. (2018). *Indonesia-EFTA Jalin Kemitraan Ekonomi Komprehensif*. BPDP. <https://www.bdpd.or.id/Indonesia-EFTA-Jalin-Kemitraan-Ekonomi-Komprehensif>
- Center, F. (2018). *INDONESIA - EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*. Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan.
- Ditjen PPI. (2021). *INDONESIA – EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/eropa/efta>
- Hani, S. N., & Purwoto, H. (2025). *Analisis Pengelolaan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. 3, 402–410.
- Larasati, E. (2021). *Pemerintah Mudahkan Aturan Perdagangan ke Empat Negara Eropa Untuk Dorong Ekspor Nasional*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/341>
- Pammasena, E. A. (2020). *Kepentingan Inggris Keluar Dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016*. 4(2), 111.
- Paryadi, D. (2020). Analisis Dampak dan Strategi untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia dalam Menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA). *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(2), 151–164. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.25>
- Pratiwi, F. (2024). *Perdagangan RI dan Swiss Meningkat Setelah Indonesia-EFTA CEPA*. REPUBLIK. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/scl137457/perdagangan-ri-dan-swiss-meningkat-setelah-indonesiaefta-cepa>
- Tempo. (2021). *Upaya Memanfaatkan Perjanjian IE-CEPA*. Berita Tempo Plus. <https://www.tempo.co/ekonomi/pengusaha-besar-dan-umkm-didorong-memanfaatkan-ie-cepa-843316>
- Tololiu, F. (2022). *Kerjasama Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) sebagai Pendorong Perbaikan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021*.